

**LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

No.	LAMPIRAN	JUDUL
1.	Lampiran I	Bentuk LKPM Tahap Pembangunan
2.	Lampiran II	Bentuk LKPM Tahap Produksi/Operasi (Komersial)
3.	Lampiran III	Bentuk Laporan Tahunan KPPA
4.	Lampiran IV	Bentuk Laporan Realisasi Impor Mesin
5.	Lampiran V	Bentuk Laporan Realisasi Impor API
6.	Lampiran VI	Bentuk Laporan Rekapitulasi Realisasi Impor Pemilik API
7.	Lampiran VII	Bentuk Laporan Rekapitulasi Realisasi Impor Mesin Dan/Atau Barang Dan Bahan
8.	Lampiran VIII	Bentuk Laporan Kumulatif atas Pelaksanaan Penanaman Modal
9.	Lampiran IX	Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan
10.	Lampiran X	Bentuk BAP
11.	Lampiran XI	Bentuk Surat Tugas Pengawasan
12.	Lampiran XII	Bentuk Surat Permohonan Pembukaan Blokir Nomor Identitas Kepabeanan
13.	Lampiran XIII	Bentuk Surat Rekomendasi Pembukaan Blokir Nomor Identitas Kepabeanan
14.	Lampiran XIV	Bentuk Permohonan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
15.	Lampiran XV	Bentuk Usulan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
16.	Lampiran XVI	Bentuk Surat Kuasa
17.	Lampiran XVII	Bentuk Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
18.	Lampiran XVIII	Bentuk Pembatalan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
19.	Lampiran XIX	Bentuk Permohonan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal
20.	Lampiran XX	Bentuk Usulan Pencabutan oleh PDPPM/PDKPM/Badan Pengusahaan KPBPB/ Administrator KEK

21.	Lampiran XXI	Bentuk Surat Pencabutan Perizinan Penanaman Modal
22.	Lampiran XXII	Surat Penutupan Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
23.	Lampiran XXIII	Bentuk Surat; A. Peringatan Tertulis I; B. Peringatan Tertulis II; C. Peringatan Tertulis III.
24.	Lampiran XXIV	Bentuk Surat Pembatasan Kegiatan Usaha
25.	Lampiran XXV	Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Pembatasan Kegiatan Usaha
26.	Lampiran XXVI	Bentuk Surat Pembatalan Pembatasan Kegiatan Usaha
27.	Lampiran XXVII	Bentuk Surat Pembekuan Kegiatan Usaha
28.	Lampiran XXVIII	Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan Fasilitas Penanaman Modal
29.	Lampiran XXIX	Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan API
30.	Lampiran XXX	Bentuk Surat Permohonan Pencabutan Pembekuan API
31.	Lampiran XXXI	Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal
32.	Lampiran XXXII	Bentuk Surat Pembatalan Pembekuan API
33.	Lampiran XXXIII	Bentuk Surat Pemberitahuan Pencabutan Kegiatan Usaha oleh PDPPM/PDKPM/BP-KPBPB/ Administrator KEK kepada BKPM

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012  
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN  
 TAHUN .....

PERIODE :

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ( )
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ( )
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ( )
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan	:	
2. - Akta pendirian	:	No. Tanggal
- Nama Notaris	:	
- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. Tanggal
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
4. Bidang Usaha	:	
5. Alamat lokasi proyek	:	Jl. Kab/Kota Telp. Fax. e-mail:
6. Alamat korespondensi	:	Jl. Kab/Kota Telp. Fax. e-mail:

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI

1. a. Pendaftaran penanaman modal	:	No. Tanggal
b. Izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal	:	No. Tanggal

2. Angka Pengenal Impor Produsen/Umum (APIP/APIU)	:	No.	Tanggal
3. Surat Persetujuan Fasilitas bea masuk impor mesin/peralatan	:	No.	Tanggal
4. Fasilitas Fiskal Lainnya	:	No.	Tanggal
5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	:	No.	Tanggal
6. Izin Lokasi	:	No.	Tanggal
7. SK Hak Atas Tanah	:	No.	Tanggal
8. Izin Mendirikan Bangunan	:	No.	Tanggal
9. Izin Lingkungan	:	No.	Tanggal
10. Izin UU Gangguan/HO	:	No.	Tanggal
11. Izin Teknis lainnya	:	No.	Tanggal

Hanya diisi sesuai dengan Perizinan yang telah dimiliki.

### III. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.( ) atau US\$. ( )]

A. Investasi	:	Tambahan	Total
1. Modal Tetap			
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:		
b. Bangunan/Gedung	:		
c. Mesin/Peralatan & Suku Cadang	:		
d. Lain-lain	:		
Sub jumlah	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing bidang usaha

B. Penyertaan dalam Modal Perseroan	:	Tambahan	Total*)
1. Asing	:		
- .....(.....= negara asal)			
- .....(.....= negara asal)			
2. Indonesia	:		
- .....			
- .....			
Jumlah			

\*)Hanya diisi bagi perusahaan PMA

## IV. REALISASI MESIN DAN PERALATAN

		Tambahan	Total *)
1. Pembelian Dalam Negeri	:		
2. Impor	:		
a. Menggunakan Fasilitas	:		
b. Tidak Menggunakan Fasilitas	:		

\*) Khusus diisi bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas impor mesin dan suku cadang, sesuai dengan Fasilitas Pabean

## V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Indonesia	:	L: Orang P: Orang	
2. Asing	:		Orang

## VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., ..... 20...  
 Penanggung Jawab,  
 Cap Perusahaan dan Tandatangani

Nama jelas :  
 Jabatan :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

**TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN MASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL**

---

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN :**

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum & HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum & HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. - Akta pendirian : Diisi nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan
  - Nama Notaris : Diisi nama notaris yang membuat akta
  - Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : Diisi nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Diisi sesuai NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak
4. Bidang Usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam pendaftaran penanaman modal/ izin prinsip penanaman modal/ persetujuan penanaman modal.
5. Alamat lokasi proyek : Diisi dengan alamat lokasi proyek, nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, facsimile dan e-mail.
6. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, facsimile dan e-mail. Kantor pusat perusahaan merupakan tempat dan kedudukan perusahaan (*Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*).

**II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI :**

Diisi perizinan yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan bidang usaha sesuai nomor dan tanggal izin-izin dan non perizinan yang telah diperoleh baik dari Instansi Pusat maupun Daerah.

**III. REALISASI INVESTASI :**

- a. Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).
- b. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya :
  - 1) Tambahan realisasi investasi yang dicantumkan adalah tambahan selama periode satu bulan sesuai pembukuan perusahaan;
  - 2) Total adalah kumulatif realisasi investasi sampai dengan bulan pelaporan sesuai pembukuan perusahaan.
  - 3) Komponen realisasi terdiri dari :

- Komponen pembelian dan pematangan tanah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
- Dalam komponen bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
- Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
- Dalam komponen lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
- Modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya overhead oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan (*trial production*).

#### IV. REALISASI MESIN DAN PERALATAN

Realisasi mesin dan peralatan merupakan pengadaan sesuai dengan realisasi pada periode pelaporan terdiri dari :

1. Pengadaan dalam negeri, yaitu mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.
2. Impor, baik yang menggunakan fasilitas atau tanpa menggunakan pabean.

#### V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga kerja Indonesia diisi dengan total penyerapan termasuk tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.
2. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan yang telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA).

#### VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta distempel perusahaan.

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012  
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL  
 TELAH ADA IZIN USAHA  
 TAHUN .....

PERIODE :

- Semester Pertama (Januari - Juni) : ( )  
 - Semester Kedua (Juli - Desember) : ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan	:	
2. Izin Usaha	:	No. Tanggal
3. Bidang Usaha	:	
4. Lokasi Proyek	:	Jl. Kab/Kota Provinsi Telp. Fax.
5. Alamat korespondensi	:	Jl. Kab/Kota Fax. Telp. e-mail

II. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.( ) atau US\$. ( )]

C. Investasi		Tambahan	Total
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

D. Sumber Pembiayaan		Tambahan	Total
3. Modal Sendiri	:		
4. Laba Ditanam Kembali (berlaku untuk perluasan usaha)	:		
5. Modal Pinjaman	:		
Jumlah	:		

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Indonesia	:	L: Orang P: Orang
2. Asing	:	Orang



## IV. REALISASI IMPOR BARANG DAN BAHAN SESUAI DENGAN API-P/API-U

		Tambahan	Total *)
1. Mesin/Peralatan	:		
3. Barang dan Bahan	:		
3. Komponen/Suku Cadang	:		
Jumlah			

\*) Total dalam 1 (satu) tahun periode pelaporan

## V. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

Nilai Ekspor dalam US\$. .....

## VI. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kemitraan	:	a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan *) b. Pola Kemitraan: 1) 2) c. Nama Perusahaan yang bermitra : 1) 2)
2. Pelatihan tenaga kerja Indonesia **)	:	a. Jenis pelatihan: 1) 2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih ..... orang
3. Tanggung jawab sosial (CSR)	:	a. Sudah/belum*) dilaksanakan b. Jenis CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya CSR Rp. ....
4. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/UKL-UPL/AMDAL *) b. Unit Pengolahan Limbah: c. Kondisi peralatan pengolah limbah : beroperasi/tidak beroperasi *)
5. Lain - Lain	:	

\*) Coret salah satu.

\*\*) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

**VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN**

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., ..... 20...

Penanggung Jawab,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama jelas :  
Jabatan :

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMAD CHATIB BASRI**

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

---

PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum & HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum & HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Izin Usaha : Diisi sesuai nomor dan tanggal izin usaha.
3. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.
4. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan lokasi/keberadaan proyek alamat lengkap nama jalan, Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota dan Provinsi telepon serta facsimile
5. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, facsimile dan e-mail.

V. REALISASI INVESTASI :

- a. Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).
- b. Untuk proyek penanaman modal asing merupakan alih status yang dalam izin usaha/persetujuan nilai investasinya dinyatakan dalam Rupiah (Rp), maka dalam laporan tetap menggunakan mata uang Rupiah (Rp).
- c. Realisasi investasi modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehannya.
- d. Apabila terdapat tambahan selama periode laporan agar dicantumkan nilai tambahan investasi baik untuk modal tetap maupun modal kerja.

VI. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

3. Tenaga kerja Indonesia diisi dengan total penyerapan termasuk tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.

4. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan yang telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA)

#### IV. REALISASI IMPOR BARANG DAN BAHAN SESUAI DENGAN API-P/API-U

Realisasi impor pada periode laporan dengan menggunakan fasilitas API-P atau API-U.

#### V. PRODUKSI /JASA DAN PEMASARAN PER-TAHUN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa : Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
2. Satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
3. Kolom Kapasitas Izin : Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan.
4. Kolom Kapasitas Terpasang : Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan shift kerja.
5. Realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun periode laporan. Apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitas terpasang yang tercantum dalam Izin Usaha, maka atas kelebihan kapasitas tersebut diwajibkan mengajukan perluasan proyek.

Kolom Nilai Ekspor : Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) selama periode laporan.

#### VI. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

##### 1. Lingkungan

Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

- a. Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diisi dengan nomor dan tanggal Penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dari Komisi AMDAL Pusat atau Daerah.
- b. Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup diisi dengan nomor dan tanggal rekomendasi UKL/UPL.

##### 2. Kemitraan

Kewajiban kemitraan sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman modal yang diisi dengan jenis kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha kecil/menengah.

3. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia

Kewajiban perusahaan yang menggunakan tenaga kerja Asing untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada tenaga kerja Indonesia diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih.

4. Tanggung jawab sosial (CSR)

Diisi apabila perusahaan melakukan kegiatan CSR dalam bentuk kegiatan sosial atau peningkatan perekonomian masyarakat disekitar lokasi proyek.

5. Lain-lain

Diisi Apabila terdapat tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan.

VII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta distempel perusahaan.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012  
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Laporan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing  
 Atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

LAPORAN  
 KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING  
 Atau  
 KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING  
 TAHUN .....

- I. Perusahaan Yang Diwakili :
1. Nama Perusahaan :
  2. Alamat Kantor Pusat :
  3. Bidang Usaha :
- II. Kantor Perwakilan :
1. Alamat :
    - a. Nama Gedung :
    - b. Nama Jalan dan Nomor :
    - c. Telepon/Fax :
    - d. Berlangsung Sejak Tahun :
  2. Wilayah kegiatan yang dicakup :
    - a. Periode laporan yang lalu :
      - 1.
      - 2.
      - 3.
    - b. Periode pelaporan :
      - 1.
      - 2.
      - 3.
  3. Manager Kantor :
    - a. Periode laporan yang lalu
      - (1) Nama :
      - (2) Kewarganegaraan (WNA/WNI) :
    - b. Periode pelaporan

(1) Nama	:		
(2) Kewarganegaraan (WNA/WNI)	:		
4. Tenaga pembantu manager	:	Asing	Indone 4. Tenaga ...
a. Periode laporan yang lalu	:		
(1) Tenaga ahli	:		
(2) Staf & Karyawan	:		
Jumlah	:	_____	
b. Periode pelaporan	:		
(1) Tenaga ahli	:		
(2) Staf & Karyawan	:		
Jumlah	:	_____	

VI. Kegiatan yang dilakukan :

Laporan ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya sesuai periode pelaporan

....., ..... 20...

Penanggung Jawab

Cap Kepala Perwakilan dan  
tandatangan

Nama Jelas

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

**TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN TAHUNAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING**

---

- I. Perusahaan yang Diwakili
  1. Nama Perusahaan : Diisi dengan nama perusahaan.
  2. Alamat Kantor Pusat : Diisi alamat kantor pusat di luar negeri.
  3. Bidang Usaha : Diisi dengan bidang usaha yang sesuai.
  
- II. Kantor Perwakilan
  1. Alamat
    - a. Nama Gedung : Diisi alamat gedung, beserta lantai lokasi kantor perwakilan.
    - b. Nama dan Nomor Jalan: Diisi nama dan nomor jalan alamat gedung lokasi kantor perwakilan.
    - c. Telepon dan fax : Diisi dengan nomor telepon dan fax kantor perwakilan yang dapat dihubungi
    - d. Berlangsung sejak : Diisi sejak kantor perwakilan mulai beroperasi.
  2. Wilayah Kegiatan yang Dicakup
    - a. Periode Laporan yang Lalu : Diisi negara-negara yang dicakup periode yang lalu
    - b. Periode Pelaporan : Diisi negara-negara yang dicakup periode pelaporan.
  3. Manager Kantor
    - a. Periode Laporan yang Lalu
      - (1). Nama : Diisi nama manager kantor perwakilan yang menjabat periode yang lalu.
      - (2) Kewarganegaraan : Diisi dengan status kewarganegaraan manager kantor perwakilan.
    - b. Periode Laporan
      - (1). Nama : Diisi nama manager kantor perwakilan yang menjabat periode pelaporan.
      - (2). Kewarganegaraan : Diisi dengan status kewarganegaraan manager kantor perwakilan.
  4. Tenaga Pembantu Manager
    - a. Tahun lalu
      - (1). Tenaga ahli : Diisi jumlah tenaga ahli yang diperkerjakan pada tahun yang lalu, baik yang berkewarganegaraan asing maupun Indonesia.
      - (2). Staf dan Karyawan : Diisi jumlah staf dan karyawan yang diperkerjakan pada tahun yang lalu, baik yang berkewarganegaraan asing maupun Indonesia.
    - b. Tahun ini
      - (1). Tenaga ahli : Diisi jumlah tenaga ahli yang diperkerjakan pada tahun ini, baik yang berkewarganegaraan asing maupun Indonesia.
      - (2). Staf dan Karyawan : Diisi jumlah staf dan karyawan yang diperkerjakan pada tahun ini, baik yang berkewarganegaraan asing maupun Indonesia.



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGELOMPOKAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Laporan Realisasi Impor Mesin**

**KOP PERUSAHAAN**

**LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN  
 BERDASARKAN SURAT PERSETUJUAN PABEAN NOMOR ..... TANGGAL .....  
 WAKTU LAPORAN.....**

No. Urut	Uraian Barang Sesuai Master List	Pos Tarif (10 digit)	Jumlah Barang	Satuan Barang	Marga Asal	Delaibahan Hongkar	Nilai Pabean (Rp US\$)	PIR Nomor	Tanggal Nomor	Invoice Tanggal
JUMLAH										

Lampiran dikirim paling lambat 7 hari setelah realisasi impor (seluruh ekspor I.P.B. jika ada di Luridatex Jakarta Pro dar. Ciba.)

**Direksi/ Penanggung Jawab  
 Gay Perusahaan**

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

(.....)

MUHAMAD CHATIB BASRI

**TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN DAN ATAU BARANG DAN BAHAN**

---

- I. **Kop Perusahaan** : berisikan informasi :
1. **Nama Perusahaan** : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum & HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum & HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
  2. **Alamat korespondensi** : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, facsimile dan e-mail.
- II. **Surat Persetujuan Pabean**  
Diisi dengan nomor dan tanggal surat persetujuan pabean/masterlist barang modal.
- III. **Nomor Urut** :  
Diisi nomor urut uraian barang sesuai masterlist
- IV. **Pos Tarif**  
Masukan Kode Pos tarif/HS 10 digit terhadap impor mesin dan/atau barang dan bahan yang didaftarkan pada saat dilakukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- V. **Jumlah Barang**  
Diisi sesuai dengan jumlah mesin dan/atau barang dan bahan yang didaftarkan pada saat dilakukan PIB
- VI. **Satuan Barang**  
Diisi sesuai dengan satuan mesin dan/atau barang dan bahan yang didaftarkan pada saat dilakukan PIB dalam unit atau buah atau kilogram/ton, m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> dan sebagainya.
- VII. **Negara Asal**  
Diisi dengan data negara asal barang sesuai dengan referensi negara.
- VIII. **Pelabuhan Bongkar**  
Diisi dengan pelabuhan tujuan tempat dibongkarnya barang impor.
- IX. **Nilai Pabean**  
Diisi dengan nilai pabean mesin dan/atau barang dan bahan sesuai dengan PIB sesuai *cost, insurance and freight* (CIF)
- X. **PIB**  
Diisi sesuai nomor dan tanggal PIB

**XI. Invoice**

Diisi sesuai nomor dan tanggal *invoice*

**XII. Jumlah**

Diisi sesuai total nilai barang sesuai CIF

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NEPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PENYEMAIAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Laporan Realisasi Impor API

KOP PERUSAHAAN

LAPORAN REALISASI IMPOR BERDASARKAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)  
 NOMOR ..... TANGGAL .....

PERIODE : Tahun .....

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ( )

- Triwulan Kedua (April - Juni) : ( )

- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ( )

- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ( )

No. Urut	Urutan Barang	Pos Tarif 10 digit	Volume	Satuan	Harga satuan (US\$)	Nilai Impor (US\$)	Negara Asal	Pelabuhan Bongkar	T/S Nomor	Tanggal	Invoice Nomor	Tanggal
JUMLAH TOTAL												

Dirreksi/Peninggung Jawab  
 Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

MUTAMAD CHANTH DASRI

( .....

**TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI IMPOR BERDASARKAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR**

---

**I. Kop Perusahaan : berisikan informasi :**

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum & HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum & HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
  
2. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, facsimile dan e-mail.

**II. API**

Diisi dengan nomor dan tanggal Angka Pengenal Importir (API-P atau API-U).

**III. Nomor Urut :**

Diisi nomor urut uraian barang sesuai yang diimpor.

**IV. Pos Tarif**

Masukan Kode Pos tarif/HS 10 digit terhadap impor mesin dan/atau barang dan bahan yang didaftarkan pada saat dilakukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

**V. Volume**

Diisi sesuai dengan jumlah mesin dan/atau barang dan bahan yang didaftarkan pada saat dilakukan PIB

**VI. Satuan**

Diisi sesuai dengan satuan mesin dan/atau barang dan bahan yang didaftarkan pada saat dilakukan PIB dalam unit atau buah atau kilogram/ton/m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> dan sebagainya.

**VII. Harga satuan**

Diisi dengan harga satuan untuk masing-masing uraian barang sesuai dengan PIB

**VIII. Nilai Impor**

Diisi dengan nilai impor mesin dan/atau barang dan bahan sesuai dengan PIB sesuai *cost, insurance and freight* (CIF)

**IX. Negara Asal**

Diisi dengan data negara asal barang sesuai dengan referensi negara.

**X. Pelabuhan Bongkar**

**Diisi dengan pelabuhan tujuan tempat dibongkarnya barang impor.**

**XI. L/S**

**Diisi sesuai nomor dan tanggal Lump Sum-payment.**

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012  
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOT PEMILIK API**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	<b>NOMOR API (API-P/API-U)</b>	<b>NILAI YANG DIIMPOR (US DOLLAR)</b>	<b>KET.</b>
	<b>Jumlah</b>			

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

**TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR PEMILIK API**

---

1. **Nomor** : Diisi dengan nomor urut.
2. **Nama Perusahaan** : Diisi sesuai akta pengesahan badan hukum
3. **Nomor API** : Diisi dengan nomor API ( API-P atau API-U) yang masih berlaku
4. **Nilai yang diimpor** : Diisi dengan nilai barang yang diimpor dalam *US Dollar*
5. **Keterangan** : Diisi dengan informasi yang diperlukan



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN TILAKSANAAN  
 PENANAMAN MODAL

LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR SP Pabean	Nilai yang disetujui		Nilai yang Diimpor		KET.
			Mesin	Barang/ Bahan	Mesin	Barang/ Bahan	

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

MUTIAMAD CHATIB BASR

**TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG  
DAN BAHAN**

---

1. **Nomor** : Diisi dengan nomor urut.
2. **Nama Perusahaan** : Diisi sesuai dengan akta perusahaan badan hukum dan perubahannya.
3. **Nomor SP Paben** : Diisi dengan nomor SP Pabean yang masih berlaku.
4. **Nilai yang disetujui** : Diisi sesuai dengan nilai yang disetujui dalam SP Pabean.
5. **Nilai yang Diimpor** : Diisi dengan nilai mesin/barang dan bahan yang diimpor dalam *US Dollar*.
6. **Keterangan** : Diisi dengan informasi yang diperlukan.

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK  
 INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA  
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Laporan Kumulatif atas Pelaksanaan Penanaman Modal**

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM**

Nomor : ...../20.. ..... 20...  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Laporan Kumulatif atas Pelaksanaan Penanaman Modal

Kepada Yang Terhormat

Bapak Presiden atau Gubernur atau Bapak Bupati/Walikota \*)

Di-

Bersama ini dengan hormat terlampir kami sampaikan laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal periode Januari s/d Maret Tahun ..... atau periode April s/d Juni Tahun ..... atau periode Juli s/d September Tahun ..... atau periode Oktober s/d Desember Tahun .....\*) berdasarkan lokasi proyek (kabupaten/kota bagi provinsi atau kecamatan bagi kabupaten/kota) dan berdasarkan sektor usaha PMDN dan PMA.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak Gubernur atau Bupati/Walikota\*) kami ucapkan terima kasih.

\*) coret yang tidak perlu.

KEPALA PDPPM atau PDKPM\*)

.....

**Tembusan:**

1. Kepala BKPM
2. Tembusan disesuaikan (Laporan Ka. PDPPM dengan tembusan kepada PDKPM, Laporan Ka. PDKPM tembusan kepada PDPPM).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Lampiran Surat No..... tanggal .....

**LAPORAN KUMULATIF ATAS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

- a. Berdasarkan Lokasi Proyek PMDN Dirinci berdasarkan lokasi per kabupaten/kota atau kecamatan.

NO	LOKASI	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET
				INDONESIA	ASING	
	<b>Jumlah</b>					

## b. Berdasarkan Sektor Usaha PMDN.

NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET
				INDONESIA	ASING	
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman pangan & perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit & alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas & percetakan					
6.	Industri kimia & farmasi					
7.	Industri karet & plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin & elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan & reparasi					
4.	Hotel & restoran					
5.	Transportasi,					

	gudang & komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri & perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
	Jumlah					

c. Berdasarkan Nama Perusahaan PMDN.

NO	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR & TANGGAL PENDAFTARAN /IZIN PRINSIP	BIDANG USAHA	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA	
					INDONESIA	ASING
Jumlah						

d. Berdasarkan Lokasi Proyek PMA Dirinci Berdasarkan Lokasi .....

NO	LOKASI	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET.
				INDONESIA	ASING	
<b>Jumlah</b>						

e. Berdasarkan Sektor Usaha PMA.

NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET.
				INDONESIA	ASING	
<b>I.</b>	<b>Sektor Primer</b>					
1.	Tanaman pangan & perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
<b>II.</b>	<b>Sektor Sekunder</b>					
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit & alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas & percetakan					
6.	Industri kimia & farmasi					
7.	Industri karet & plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin & elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan					

	bermotor & alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan & reparasi					
4.	Hotel & restoran					
5.	Transportasi, gudang & komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri & perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
	Jumlah					

f. Berdasarkan Nama Perusahaan PMA.

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO. & TGL PENDAFTARAN /IZIN PRINSIP/IZIN USAHA	BIDANG USAHA	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA	
					INDONESIA	ASING
<b>Jumlah</b>						

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI



**TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN KUMULATIF ATAS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

---

- III. Berdasarkan Lokasi Proyek PMDN**
- 4. Nomor urutan : Diisi dengan nomor urutan.
  - 5. Lokasi : Diisi berdasarkan lokasi proyek berdasarkan Kabupaten/Kota untuk laporan PDPPM kepada Gubernur. Per kecamatan untuk laporan PDKPM kepada Bupati/Walikota.
  - 6. Jumlah Proyek : Diisi jumlah proyek kumulatif periode laporan.
  - 7. Realisasi Investasi : Diisi jumlah investasi kumulatif periode laporan sesuai dengan jumlah proyek kumulatif periode laporan.
  - 8. Penyerapan Tenaga Kerja : Diisi jumlah tenaga kerja baik Indonesia maupun Asing sesuai dengan realisasi proyek.
  - 9. Keterangan : Diisi informasi yang diperlukan terkait laporan.
- IV. Berdasarkan Sektor Usaha PMDN**
- 1. Sektor : Diisi dengan nomor urutan.
  - 2. Jumlah Proyek : Diisi jumlah proyek kumulatif periode laporan.
  - 3. Realisasi Investasi : Diisi jumlah investasi kumulatif periode laporan sesuai dengan jumlah proyek kumulatif periode laporan.
  - 4. Penyerapan Tenaga Kerja : Diisi jumlah tenaga kerja baik Indonesia maupun Asing sesuai dengan realisasi proyek.
  - 5. Keterangan : Diisi informasi yang diperlukan terkait laporan.
- V. Berdasarkan nama perusahaan PMDN**
- 2. Nomor urutan : Diisi dengan nomor urutan.
  - 3. Nama Perusahaan : Diisi sesuai dengan akta pengesahan badan hukum dan perubahannya.
  - 4. Nomor & Tanggal Pendaftaran/ Izin Prinsip dan perubahannya : Diisi dengan nomor dan tanggal Pendaftaran/Izin Prinsip
  - 5. Bidang Usaha : Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Pendaftaran/Izin Prinsip serta sesuai dengan Anggaran Dasar.
  - 6. Realisasi Investasi : Diisi jumlah investasi kumulatif periode laporan sesuai dengan jumlah proyek kumulatif periode laporan.
  - 7. Penyerapan Tenaga Kerja : Diisi jumlah tenaga kerja baik Indonesia maupun Asing sesuai dengan realisasi proyek.

d,e,f ditulis seperti a,b,c hanya berbeda status perusahaannya

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan  
 Pelaksanaan Penanaman Modal**

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM**

Nomor : ...../20.... , ..... 20...  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : -  
 Hal : Pemberitahuan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.  
 Direksi PT.  
 Jl.

Sehubungan dengan surat ....(nama lembaga)... tertanggal ....., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa BKPM/PDPPM/PDKPM dan Dinas ..... bermaksud melakukan pengawasan ..... yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal perusahaan Saudara pada tanggal ....., dengan petugas sebagai berikut :

1. ....
  2. ....
- dst.

Kami mohon, kiranya Saudara dapat menerima dan memberikan informasi sesuai dengan maksud pengawasan tersebut. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pengawasan ini Saudara dapat menghubungi Sdr ..... melalui telepon/fax .....

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala .....,

Cap lembaga

Nama Jelas

**Tembusan:**

Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;  
 Kepala PDPPM atau PDKPM.

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMAD CHATIB BASRI**

LAMPIRAN X  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

### Bentuk Berita Acara Pengawasan

**BERITA ACARA PENGAWASAN (BAP)**  
 Nomor :     /BAP/DW-...../bulan/2012

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
 ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah terkait dan wakil dari perusahaan, telah melakukan pengawasan penggunaan fasilitas penanaman modal dan ketentuan penanaman modal :

#### I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan									
2. Nomor Pokok Wajib Pajak									
3. Bidang Usaha									
4. Lokasi Proyek - Alamat	<table> <tr> <td>Kota/Kab.</td> <td>Provinsi</td> </tr> <tr> <td>Jl.</td> <td>Kode Pos :</td> </tr> <tr> <td>Telp.</td> <td>Fax.</td> </tr> <tr> <td>e-mail</td> <td></td> </tr> </table>	Kota/Kab.	Provinsi	Jl.	Kode Pos :	Telp.	Fax.	e-mail	
Kota/Kab.	Provinsi								
Jl.	Kode Pos :								
Telp.	Fax.								
e-mail									

#### II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIMILIKI (dilampirkan)

1.	Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal	No.	Tanggal
2.	a.SP Fasilitas Impor Mesin	No.	Tanggal
	b.SP Fasilitas Impor Bahan	No.	Tanggal
	c. Kep. Fasilitas PPh (IA atau TH)	No.	Tanggal

### III. FASILITAS IMPOR MESIN/PERALATAN

- |                                 |        |          |
|---------------------------------|--------|----------|
| A. Jumlah Nilai dalam SP Pabean | : US\$ |          |
| B. Nilai yang telah diimpor     | : US\$ | (.....%) |
| C. Sisa yang masih akan diimpor | : US\$ | (.....%) |

### IV. PENGADAAN MESIN/PERALATAN DARI DALAM NEGERI

Pengadaan Dalam Negeri : Rp .....(US\$ ....)

### V. FASILITAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

- |   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| A. Volume Barang dan Bahan dalam SP Pabean  | : | Ton/Unit          |
| B. Volume yang telah diimpor                | : | Ton/Unit (.....%) |
| C. Sisa yang belum diimpor                  | : | Ton/Unit (.....%) |
| D. Jumlah Nilai dalam SP Pabean             | : | US\$              |
| E. Nilai yang telah diimpor<br>(.....%)     | : | US\$              |
| F. Sisa yang masih akan diimpor<br>(.....%) | : | US\$              |

### VI. PELAKSANAAN KETENTUAN PENANAMAN MODAL

## VII. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

Mengetahui  
Pimpinan / Penanggung  
Jawab Perusahaan

Cap

.....(Nama)  
.....(Jabatan)

Pemeriksa,

1. Koordinator  
BKPM atau PDPPM atau PDKPM:  
Nama :  
Jabatan :

Tanda  
Tangan,

.....

2. BKPM atau PDPPM atau PDKPM  
Nama :  
Jabatan :

.....

3. Wakil Instansi .....  
Nama :  
Jabatan :

.....

4. Wakil Instansi .....  
Nama :  
Jabatan :

.....

Dan seterusnya sesuai kebutuhan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

**TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)**

---

---

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN :**

1. Nama Perusahaan : Diisi nama perusahaan sesuai izin usaha/persetujuan dan dicocokkan dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : Diisi dengan NPWP Perusahaan
3. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Usaha/Persetujuan dan/atau Izin Operasional/Izin Usaha Tetap.
4. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan alamat lokasi proyek nama jalan, nomor bangunan, kelurahan/ /desa, kecamatan, kabupaten/kota, kode pos, nomor telepon, facsimile dan e-mail.

**II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIMILIKI :**

Diisi secara lengkap dan benar sesuai dengan perizinan dan non perizinan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu nomor izin-izin dan tanggal baik yang diterbitkan oleh Instansi Pusat maupun Daerah. Copy perizinan dilampirkan dalam BAP.

**III. FASILITAS IMPOR MESIN/PERALATAN**

1. Jumlah Nilai dalam SP Pabean : Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SP Pabean (masterlist)
2. Nilai yang telah diimpor : Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/Invoice), persentase terhadap jumlah nilai dalam SP Pabean dan dicek keberadaannya di lokasi proyek
3. Sisa yang masih akan diimpor : Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SP Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SP Pabean dan masih akan dilakukan impor.

**IV. PENGADAAN MESIN/PERALATAN DARI DALAM NEGERI**

Dicantumkan nilai mesin/peralatan yang dibeli dari dalam negeri dengan setara dalam *US Dollar*.

**V. FASILITAS IMPOR BARANG DAN BAHAN**

1. Volume Barang dan Bahan dalam SP Pabean :  
Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam SP Pabean
2. Volume yang telah diimpor :  
Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/Invoice), persentase terhadap jumlah nilai dalam SP Pabean
3. Sisa yang belum diimpor :  
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SP Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SP Pabean dan masih akan dilakukan impor
4. Jumlah Nilai dalam SP Pabean :  
Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SP Pabean (masterlist)
5. Nilai yang telah diimpor :  
Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/Invoice), persentase terhadap jumlah nilai dalam SP Pabean
6. Sisa yang masih akan diimpor :  
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SP Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SP Pabean dan masih akan dilakukan impor

**VI. PELAKSANAAN KETENTUAN PENANAMAN MODAL**

1. Penyampaian LKPM sesuai periode pelaporan
2. Pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja Indonesia.
3. Kemitraan sesuai bidang usaha
4. Kewajiban Lingkungan UKL/UPL atau AMDAL
5. CSR bagi perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan.

**VII. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN**

Diisi hasil temuan lapangan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan sesuai dengan maksud dibuatnya BAP, antara lain agar dijelaskan tentang :

1. Mesin-mesin pokok yang diimpor telah terpasang; jika belum terpasang dijelaskan alasannya dan kenapa
2. Kesesuaian jumlah mesin/peralatan pokok yang diimpor dengan jumlah mesin/peralatan pokok yang ada di lokasi proyek. Jika ada perbedaan, sebutkan alasannya
3. Bahan baku yang diimpor dirinci:
  - berapa yang sudah digunakan;
  - berapa yang masih ada di gudang;apabila ada perbedaan, agar dijelaskan
4. Perkiraan produksi/operasi komersial : bulan.... tahun ....
5. Temuan lain yang dianggap perlu terkait dengan penggunaan fasilitas penanaman modal

Penandatanganan BAP dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan dan koordinator beserta seluruh wakil instansi terkait yang melakukan BAP di lokasi proyek perusahaan yang bersangkutan.

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Tugas Pengawasan  
 Pelaksanaan Penanaman Modal**

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KPBPB ATAU  
 ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : ...../20.... , ..... 20...  
 Lampiran : --  
 Hal : Surat Tugas Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.  
 Direksi PT.  
 Jl.

Sehubungan dengan surat .....(nama lembaga)... tertanggal ..... tentang kesediaan waktu pelaksanaan pengawasan pada tanggal ....., dengan ini dapat kami sampaikan bahwa BKPM/PDPPM/PDKPM/BP-KPBPB/Administrator KEK menugaskan pejabat untuk kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. .... , NIP ....., Jabatan .....
  2. .... , NIP ....., Jabatan .....
- dst.

Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan ini Saudara dapat menghubungi Sdr ..... melalui telepon/fax .....

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala .....,

Cap lembaga

Nama Jelas

**Tembusan:**

1. Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI



LAMPIRAN XII  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Permohonan Pembukaan Blokir NIK**

**KOP PERUSAHAAN**

Nomor : ...../ML/20.. , .....20 ..  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Pembukaan Blokir Nomor Induk Kepabeanan

Yth.

Kepala BKPM  
 up. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM  
 BKPM, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 44  
 Jakarta, 12190

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Jabatan : Direksi/Kuasa\*)  
\*) Pilih salah satu
3. Nama Perusahaan : .....
4. Lokasi Proyek : Jl. ....  
Kab/kota.....Provinsi.....  
Telp. ....Fax. ....
5. Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap yang diajukan Pencabutan : .....

Dengan ini mengajukan permohonan pembukaan Blokir NIK sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

1. Rekaman invoice barang yang akan diimpor
2. Rekaman *Bill of Lading* atau *Airways of Lading*
3. LKPM periode terakhir
4. Surat kuasa bagi penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pembukaan blokir NIK, apabila dikuasakan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Meterai 6.000

Tandatangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Tembusan:

Kepala PDPPM .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Rekomendasi Pembukaan Blokir NIK**

**KOP SURAT BKPM**

Nomor : /ML/20.. .....20..  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : -  
 Hal : Rekomendasi untuk Pembukaan Pemblokiran Kegiatan Impor

Yth Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
 Jl. Jenderal A. Yani (*By Pass*)  
 JAKARTA 10002

u.p.  
 Direktur Penyidikan dan Penindakan

Sehubungan dengan surat PT. .... tanggal ....., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat serta memperhatikan Pemblokiran Kegiatan Impor Secara Nasional sesuai surat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. .... tanggal ....., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PT. .... adalah perusahaan dalam rangka PMDN/PMA dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor ..... tanggal ....., dengan Izin Usaha No. .... tanggal ..... serta Angka Pengenal Importir Produsen/Angka Pengenal Importir Umum No. .... tanggal ....., di bidang usaha ....., yang berlokasi di ....., Provinsi ....., dengan alamat kantor pusat perusahaan di .....
2. Perusahaan akan mengimpor barang-barang untuk kegiatan usahanya antara lain: ..... sesuai Invoice No. .... tanggal ..... dan barang tersebut akan dikirim dengan dokumen B/L (Bill of Lading) No. .... tanggal .....

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya kepada PT. .... dapat dilakukan pembukaan pemblokiran kegiatan impornya.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Direktur Wilayah ...,

.....

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Kepala PDKPM .....;
5. Direktur PT. ....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/  
 Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal**

**KOP PERUSAHAAN**

Nomor : ..... , ..... 20...  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan  
 Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal

Yth.

Kepala BKPM/PDPPM/PDKPM/BP-KPBPB/Administrator KEK

Jl. ....

Sehubungan dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal No. .... tanggal ..... atas nama PT. .... di bidang usaha ..... berlokasi di kabupaten/Kota ....., Provinsi ....., dengan alasan ....., dengan ini dapat kami sampaikan bahwa rencana investasi kami sesuai perizinan tersebut diatas tidak jadi direalisasikan, untuk itu kami mohon dapat dilakukakan pembatalan.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

1. Pernyataan seluruh pemegang saham yang menyatakan membatalkan rencana kegiatan investasi sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal No. .... tanggal .....
2. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal

Kuasa Pemegang Saham/Direksi

Tanda Tangan & Cap Perusahaan

Nama Jelas

.....

**Tembusan:**

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Pendaftaran Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XV  
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

### Bentuk Usulan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal

#### KOP SURAT PDPPM ATAU BP-KPBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK

Yth.

Kepala BKPM

JL. Jenderal Gatot Subroto NO.44 Jakarta 12190

Sehubungan dengan hasil pemantauan yang kami lakukan terhadap PT. ...., dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor ..... tanggal ..... di bidang usaha ..... dengan lokasi ....., dan memperhatikan Berita Acara Pengawasan yang dilakukan pada tanggal ..... ( *copy* terlampir), perusahaan yang bersangkutan tidak ditemukan lagi keberadaannya sesuai perizinan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKPM No. 3 Tahun 2012, kami mengusulkan perizinan penanaman modal perusahaan yang bersangkutan dapat dilakukan pencabutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Kepala PDPPM/PDKPM/BP-KPBPB/  
Administrator KEK

Tandatangan dan CAP

Nama Jelas

#### Tembusan

1. Gubernur...;
2. Bupati/Walikota .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pembatalan/Pencabutan Pendaftaran  
 Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman  
 Modal/  
 Izin Usaha/Izin Usaha Tetap**

**SURAT KUASA**

NOMOR: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

\_\_\_\_\_, Warga Negara \_\_\_\_\_ pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /  
 Paspor No. \_\_\_\_\_, bertindak dalam kapasitasnya sebagai \_\_\_\_\_ dari  
 dan karenanya untuk dan atas nama \_\_\_\_\_, perseorangan/perusahaan yang  
 didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara \_\_\_\_\_,  
 berkedudukan di \_\_\_\_\_, dan beralamat di \_\_\_\_\_;

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi  
 kepada : \_\_\_\_\_, Warga Negara \_\_\_\_\_, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
 (KTP) / Paspor No. \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_;

(selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

----- KHUSUS -----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :  
 .....

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk  
 menghadap Pejabat BKPM/PDPPM/PDKPM/Badan Pengusahaan  
 KPBPB/Administrator KEK\*) untuk memberikan semua keterangan yang  
 diperlukan, untuk menandatangani permohonan pembatalan Pendaftaran  
 Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman  
 Modal/Izin Usaha/Izin Usaha Tetap yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan  
 fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak  
 mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan  
 apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh  
 karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut  
 pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin

timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

\*) coret yang tidak perlu

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, \_\_\_\_\_, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai

\_\_\_\_\_  
Nama:

Jabatan:

\_\_\_\_\_  
Nama:

Jabatan:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI



LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/  
 Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal**

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU BPKPBPB ATAU  
 ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /B/...../20..... , .....20...  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/  
 Izin Prinsip Penanaman Modal/  
 Persetujuan Penanaman Modal**

Yth.

Direksi PT. ....

Jl. ....

Sehubungan dengan surat Saudara No. ....tanggal  
 ....., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan  
 memperhatikan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman  
 Modal/Persetujuan Penanaman Modal No. .... tanggal ..... jo.  
 No. .... atas nama PT. .... di bidang usaha  
 .... dengan lokasi proyek di kabupaten/Kota  
 ....., Provinsi ....., dengan alasan  
 ....., dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Peraturan  
 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman  
 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pendaftaran Penanaman  
 Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dimaksud  
 dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,  
 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
 ATAU  
 KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP KPBPB/ADMINISTRATOR KEK,

.....

**Tembusan:**

**Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMAD CHATIB BASRI**

LAMPIRAN XVIII  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Pembatalan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing  
 Atau  
 Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing**

**KOP SURAT BKPM**

Nomor : /B/VII/KPPA/20.... Jakarta,.....  
 NPWP :  
 Hal : Pembatalan Izin Kantor  
 Perwakilan Perusahaan Asing  
 atau Perwakilan perusahaan  
 Perdagangan Asing

Yth.  
 Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing atau  
 Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing  
 .....  
 Jl. ....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. .... tanggal ..... 20..., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing serta Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui permohonan pembatalan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing/ Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing No. .... tanggal 26 ..... Dengan demikian Izin Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing/ Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dimaksud atas nama ..... di bidang usaha ..... yang berlokasi di ....., Provinsi ..... dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

Dengan pembatalan ini maka fasilitas/kemudahan berupa :

- a. Izin Kerja Tenaga Asing;
- b. Multiple Exit Re-Entry Permit;
- c. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN),

yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing/Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tersebut, kami nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,  
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL,

.....

**Tembusan :**

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Duta Besar Republik Indonesia untuk ..... ;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Kepala PDPPM;
7. Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XIX  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/  
 Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal  
 dan/atau  
 Izin Usaha/Izin Usaha Tetap**

**KOP PERUSAHAAN**

Nomor : ...../20.. ..... 20 ..  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin  
 Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal  
 dan/atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap**

Yth.

Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM .....

Jl. ....

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Jabatan : **Direksi/Likuidator/Kuasa\*)**  
\*) Pilih salah satu
3. Nama Perusahaan : .....
4. Alamat Kantor Perusahaan : **Jl. ....**  
**Kab/Kota .....Kode Pos .....**  
**Telp.....Fax.....e-mail.....**
5. Lokasi Proyek : **Jl. ....**  
**Kab/kota.....Provinsi.....**  
**Telp. .... Fax. ....**
6. **Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap yang diajukan Pencabutan** : .....

Dengan ini mengajukan permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, dengan alasan..... Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

5. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan pencabutan Izin Prinsip/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap serta menyatakan penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan;
6. Rekaman akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM;
7. Rekaman pencatatan pembubaran perseroan Kementerian Hukum dan HAM (khusus bagi perseroan yang dilikuidasi)
8. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
9. LKPM periode Terakhir;
10. Surat kuasa bagi penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Meterai 6.000

Tandatangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; atau
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XX  
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Usulan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan  
Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha oleh PDPPM,  
PDKPM, BP- KPBPB atau Administrator KEK**

**KOP SURAT PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KPBPB ATAU ADMINISTRATOR  
KEK**

Yth.  
Kepala BKPM  
Jl. ....

Sehubungan dengan hasil pemantauan yang kami lakukan terhadap PT. ...., dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor ..... tanggal ..... di bidang usaha ..... dengan lokasi ....., dan memperhatikan Berita Acara Pengawasan yang dilakukan pada tanggal ..... (copy terlampir), perusahaan yang bersangkutan tidak ditemukan lagi keberadaannya sesuai perizinan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012, kami mengusulkan perizinan penanaman modal perusahaan yang bersangkutan dapat dilakukan pencabutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

**Kepala PDPPM/PDKPM/BP-KPBPB/  
Administrator KEK**

**Tandatangan dan Cap**

**Nama Jelas**

**Tembusan:**

3. Gubernur ...;
4. Bupati/Walikota ...

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMAD CHATIB BASRI**

LAMPIRAN XXI  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Keputusan Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM tentang  
 Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal  
 /Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin usaha/Izin Usaha Tetap**

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KPBPB ATAU  
 ADMINISTRATOR KEK**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 NOMOR : /C/KODE BULAN/PMDN atau PMA TAHUN .....**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/IZIN PRINSIP  
 PENANAMAN MODAL /PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ATAU  
 IZIN USAHA / IZIN USAHA TETAP  
 ATAS NAMA PT. ....  
 NPWP : .....**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal No. .... tanggal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor .... tanggal ..... kepada PT. .... telah disetujui untuk berusaha di bidang ....., dengan lokasi di Kab/Kota ....., Provinsi.....;
  - b. bahwa berdasarkan surat permohonan PT. .... No. .... tanggal ..... dan kelengkapan data tanggal ..... mengenai permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal No. .... tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor .... tanggal ..... atas nama PT. ...., dengan alasan .....
  - c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. .... yang dinyatakan dengan Akta Notaris ....., No. .... tanggal ..... di ....., para pemegang saham menyetujui untuk .....
  - d. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor .... Tanggal tentang .....
  - e. bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan proyek (BAP)



..... tanggal ..... oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM atau PDPPM atau PDKPM\*) yang merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal No. .... tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor ..... tanggal .....

f. bahwa . . .

f. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal No. .... tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor ..... tanggal ..... atas nama PT. ....

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  2. Peraturan Presiden No 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  3. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  4. Peraturan Menteri Keuangan No. 176/KMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan Untuk pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan No. 76/KMK.011/2012.
  5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
  7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL atau PERANGKAT DAERAH PROVINSI BIDANG PENANAMAN MODAL atau PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BIDANG PENANAMAN MODAL TENTANG PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/ PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ATAU IZIN USAHA/IZIN USAHA TETAP ATAS NAMA PT. ....
- Pertama** : Mencabut Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan atau/ Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap Nomor .....tanggal ..... 20... atas nama PT. .... di bidang usaha ..... dengan lokasi di Kabupaten/Kota ....., Provinsi .....
- Kedua . . .
- Kedua** : Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal No. .... tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor ..... tanggal ..... sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang bersangkutan.
- Ketiga** : Kepada PT ..... diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin/peralatan dan bahan baku/penolong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\*\*)
- \*\*.) Apabila perusahaan telah menikmati fasilitas.
- Keempat** : Kepada PT ..... diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
ATAU  
KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP-KPBPB/ADMINISTRATOR  
KEK

.....

**Tembusan:**

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Pendaftaran penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXII  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penutupan Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

**KOP SURAT BKPM**

Nomor : ..... , ..... 20...  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Penutupan Izin Usaha Perwakilan  
 Perusahaan Perdagangan Asing

Yth

Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

.....  
 Jl .....  
 .....

Berdasarkan hasil penelitian kami atas surat dari Kantor Pusat ..tanggal....., yang kami terima tanggal ..... perihal tersebut di atas , dengan ini kami beritahukan bahwa kami menyetujui permohonan Saudara untuk menutup Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.....

Dengan ditutupnya Kantor Perwakilan tersebut, maka Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) yang Saudara miliki Nomor ..... tanggal ..... yang berlaku sampai dengan tanggal .....atas nama ..... (Indonesia) dinyatakan tidak berlaku sejak surat ini diterbitkan.

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

.....  
 NIP.....

**Tembusan**

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Duta Besar Republik Indonesia di,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXIII A  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama**

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU KPBPB ATAU  
 ADMINISTRASI KEK**

Nomor : ...../...../...../20..... , ..... 20...  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : --  
 Perihal : Peringatan Tertulis Pertama

Yth  
 Direksi PT.  
 Jl .....

Sehubungan dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal Nomor ..... tanggal .....dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor ..... tanggal ..... atas nama PT ..... dibidang usaha .....dengan lokasi di Kab/Kota .....Provinsi ....., dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami belum memenuhi kewajiban ..... sesuai ketentuan .....

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memberikan peringatan pertama dan kami harapkan tanggapan tertulis disampaikan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM\* paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara akan diberikan peringatan kedua.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
 ATAU  
 KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP-KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

**Tembusan**

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

**MUHAMAD CHATIB BASRI**

LAMPIRAN XXIII B  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Peringatan Tertulis Kedua**

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU KPBPB ATAU  
 ADMINISTRASI KEK**

Nomor : ...../...../...../20..... , ..... 20...  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : --  
 Perihal : Peringatan Tertulis Kedua

Yth  
 Direksi PT.  
 Jl .....

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Pertama Nomor ..... tanggal ..... dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan dari Saudara, dengan ini kami berikan peringatan kedua dan kami harapkan tanggapan tertulis Saudara agar disampaikan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM\*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini

Demikian agar Saudara maklum.

a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
 ATAU  
 KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP-KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

**Tembusan**

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

**MUHAMAD CHATIB BASRI**

LAMPIRAN XXIII C  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Peringatan Tertulis Ketiga**

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU KPBPB ATAU  
 ADMINISTRASI KEK**

Nomor : ...../...../...../20..... , ..... 20...  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : --  
 Perihal : Peringatan Tertulis Ketiga

Yth  
 Direksi PT.  
 Jl .....

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Kedua Nomor ..... tanggal ..... dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan dari Saudara, dengan ini kami berikan peringatan ketiga (terakhir) dan kami harapkan tanggapan tertulis Saudara agar disampaikan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM\*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini

Apabila perusahaan tidak menyampaikan tanggapan/penjelasan akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
 ATAU  
 KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP-KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

**Tembusan**

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

**MUHAMAD CHATIB BASRI**

LAMPIRAN XXIV  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Pembatasan Kegiatan Usaha**

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KPBPB ATAU  
 ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /B/...../20..... , ..... 20...  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : -  
 Hal : Pembatasan kegiatan usaha

Yth.  
 Direksi PT. ....  
 Jl. ....

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta memperhatikan Peringatan Tertulis Ketiga sesuai surat Nomor ..... tanggal ..... atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap\*) No. .... tanggal ..... yang disetujui di bidang usaha ..... berlokasi di Kab/Kota.....Provinsi....., yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi administratif Surat Peringatan Ketiga, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan berupa Pembatasan Kegiatan Usaha.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap\*) diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan tanggapan/penjelasan maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha dan atau Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.



a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
ATAU  
KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP-KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

\*) Coret yang tidak perlu

**Tembusan Yth:**

1. Menteri Teknis .....
2. Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau PDKPM (menyesuaikan);
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5. Instansi Teknis yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXV  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Permohonan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau  
 Fasilitas Penanaman Modal**

**KOP PERUSAHAAN**

Nomor : ...../20..... , ..... 20...  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha  
 dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yth.  
 Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM  
 Jl. ....  
 .....

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon : .....
2. Perusahaan : .....
3. Alamat Kantor Perusahaan : .....  
 .....Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek : .....
5. Pendaftaran Penanaman Modal/  
 Izin Prinsip Penanaman Modal/  
 Persetujuan Penanaman Modal  
 dan/atau Izin Usaha/  
 Izin Usaha Tetap : .....

dengan ini kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai surat Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM atau Kepala BP-KPBPB atau Administrator KEK Nomor ..... tanggal ....., dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi pembekuan kegiatan usaha tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

**Meterai 6.000**  
**Tanda Tangan dan Cap Perusahaan**

.....

...  
**Nama Jelas Direktur/Kuasa**

**Tembusan :**

- 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;**
- 2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.....**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMAD CHATIB BASRI**

LAMPIRAN XXVI  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha**

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KPBPB ATAU  
 ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /...../20..... ..... 20....  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Pembatalan Sanksi Administratif  
 Pembatasan Kegiatan Usaha

Yth.  
 Direksi PT. ....  
 Jl. ....  
 .....

Sehubungan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan atas pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan atas Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha sesuai surat Nomor ..... tanggal ....., maka pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal//Persetujuan Penanaman Modal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap No. .... tanggal .....yang disetujui dibidang usaha ..... berlokasi di Kab/Kota.....Provinsi....., dinyatakan batal dan perusahaan diizinkan untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
 ATAU  
 KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP-KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

**Tembusan :**

Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXVII  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha**

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KPBPB ATAU  
 ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /B/...../20..... , ..... 20...  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : -  
 Perihal : Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha

Yth.

Direksi PT. ....

Jl. ....

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta memperhatikan sanksi administrasi Pembatasan Kegiatan Usaha sesuai surat Nomor ..... tanggal ..... atas pelaksanaan atau Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap No. .... tanggal ..... yang disetujui dibidang usaha ..... berlokasi di Kab/Kota ..... Provinsi....., yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi tersebut, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan Pembekuan Kegiatan Usaha.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban dimaksud, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan permohonan pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pencabutan Kegiatan Usaha.

Demikian agar Saudara maklum.

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
 ATAS NAMA KEPALA BKPM/  
 KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP KPBPB/ADMINISTRATOR  
 KEK

.....

**Tembusan :**

- **Disesuaikan dengan tembusan pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMAD CHATIB BASRI**

LAMPIRAN XXVIII  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan  
 Fasilitas Penanaman Modal**

**KOP SURAT BKPM**

Nomor : /B/...../20..... , ..... 20...  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : -  
 Perihal : Sanksi Administratif Pembekuan  
 Fasilitas Penanaman Modal

Yth.

Direksi PT. ....

Jl. ....

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta memperhatikan sanksi administrasi Pembekuan Kegiatan Usaha Penanaman Modal sesuai surat Nomor ..... tanggal ..... atas pelaksanaan atau Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap No..... tanggal ..... yang disetujui dibidang usaha ..... berlokasi di Kab/Kota ..... Provinsi ....., yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi tersebut, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan Pembekuan Fasilitas Penanaman Modal atas Surat Persetujuan Pabean No. .... tanggal .....

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban dimaksud, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan permohonan pencabutan Pembekuan Fasilitas Penanaman Modal, maka akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pencabutan Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
 PENANAMAN MODAL,

.....

**Tembusan :**

- **Disesuaikan dengan tembusan pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMAD CHATIB BASRI**



LAMPIRAN XXIX  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan  
 Angka Pengenal Import (API)**

**KOP SURAT BKPM**

Nomor : /B/...../20..... , ..... 20...  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : -  
 Perihal : Sanksi Administratif Pembekuan API

Yth.

Direksi PT. ....

Jl. ....

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta memperhatikan surat peringatan ke-3 (ketiga) Nomor .... tanggal ....., disebabkan karena tidak ada tanggapan pemenuhan kewajiban, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan berupa Pembekuan API No..... tanggal.....

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan permohonan pencabutan Pembekuan API ini, maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pencabutan API tersebut diatas.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
 PENANAMAN MODAL,

.....

**Tembusan :**

- Disesuaikan dengan tembusan pada API

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXX  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Permohonan Pencabutan Sanksi Pembekuan API**

**KOP PERUSAHAAN**

Nomor : ..... /20 .. ..... 20..

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Pencabutan Sanksi  
 Pembekuan API

Yth.

KEPALA BKPM

Jl.....

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon : .....
2. Perusahaan : .....
3. Alamat Kantor : .....Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek : .....
5. Angka Pengenal Importir : Nomor ..... tanggal .....
- (APIP/APIU)

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif pembekuan API sesuai surat Kepala BKPM Nomor ..... tanggal ....., dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan pencabutan sanksi ini kami sampaikan, dan seluruh data yang disampaikan dapat kami pertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

....., ..... 20...

Meterai 6.000  
 Tandatangani Direktur/Dikuasakan  
 Cap Perusahaan

Nama Jelas

**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Kepala PDPPM atau PDKPM.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

**MUHAMAD CHATIB BASRI**

LAMPIRAN XXXI  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha  
 dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**

**KOP PERUSAHAAN**

Nomor : ..... 20 .. ..... 20...

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha  
 dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yth.

Kepala BKPM/PDPPM/PDKPM/Badan Pengusahaan KPBPB atau  
 Administrator KEK

Jl. ....

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon : .....
2. Perusahaan : .....
3. Alamat Kantor Perusahaan : .....  
 .....Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek : .....
5. Pendaftaran Penanaman Modal/  
 Izin Prinsip Penanaman Modal/  
 Persetujuan Penanaman Modal dan/  
 atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap : Nomor .....tanggal.....

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai surat BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK Nomor ..... tanggal ....., dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, seluruh data yang kami lampirkan dapat dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang-undangan .

Meterai 6.000

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....

Nama Jelas Direktur/Kuasa

**Tembusan:**

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXXII  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

### Bentuk Surat Pembatalan Pembekuan API

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KPBPB ATAU  
 ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /...../20..... ..... 20....  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Pembatalan Pembekuan API

Yth.  
 Direksi PT. ....  
 Jl. ....  
 .....

Sehubungan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal  
 sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan atas  
 pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan atas Sanksi  
 Pembekuan API sesuai surat Nomor ..... tanggal ....., maka  
 pengenaan sanksi pembekuan API, dinyatakan batal dan perusahaan dapat  
 melakukan kegiatan impor.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
 ATAU  
 KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP-KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....  
Tembusan :  
 Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXXIII  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha**

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KBPBP ATAU ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : ...../20..... ,..... 20...  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha a.n PT

Yth.

Direksi PT. ....

Jl. ....

.....

Sehubungan dengan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha sesuai surat No. .... tanggal ..... (copy surat terlampir) kepada PT. .... atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap No. .... tanggal ..... yang disetujui dibidang usaha ..... berlokasi di Kab/Kota.....Provinsi....., mengingat perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas bea masuk mesin dan/atau fasilitas impor barang dan bahan sesuai Surat Persetujuan Pabean No. .... tanggal, dengan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada perusahaan tersebut perlu ditindaklanjuti BKPM dengan membekukan Fasilitas Penanaman Modal yang bersangkutan.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
 ATAU  
 KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP-KBPBP/ADMINISTRATOR KEK

.....

**Tembusan:**

Tembusan disesuaikan dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI